

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) OLEH DINAS SOSIAL KOTA
BANDA ACEH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
SRI ANGGUN OKTAVIANA
NIM. 190802039**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sri Anggun Oktaviana
NIM : 190802039
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lampahan 17 Oktober 2000
Alamat : Bener Meriah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 13 Desember 2023

Yang menyatakan



SRI ANGGUN OKTAVIANA
NIM. 190802039

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGs) OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH
DALAM MENGURANGI KEMISKINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeproleh Gelar
Sarjana (SI) Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SRI ANGGUN OKTAVIANA**NIM. 190802039**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Adaministrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

**Prof. Dr.phil. Saiful Akmal, MA.****NIP. 198203012008011006**

Pembimbing II,

**Mirza Fanzikri, S.sos.I.,M.Si****NIP. 199007022020121010**

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE*
***DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) OLEH DINAS SOSIAL KOTA**
BANDA ACEH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
 Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023 M
 7 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh,

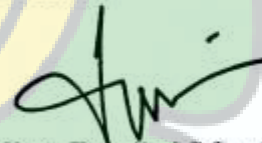
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. phil. Saiful Akmal, MA
 NIP. 198203012008011006

Sekretaris,



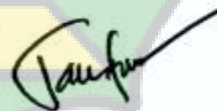
Mirza Fanzikri, S.Sos.I.M.Si
 NIP. 1990070220202121010

Penguji I,



Eka Januar, M.Soc.Sc.
 NIP.19840101201521003

Penguji II,



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si
 NIDN. 2018058903

Mengetahui
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
 NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Fenomena kemiskinan saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat di tuntaskan secara maksimal. Adanya kemiskinan ekstrem di beberapa negara menjadi penyebab dasar dari program yang di prakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat sebuah pertemuan pada September 2000 yang di ikuti oleh 189 Negara dengan menyetujui deklarasi yang di kenal dengan sebutan *The Milenium Development Goals* (MDGS) yang kemudian berlanjut menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* yang dapat mengurangi kemiskinan dan untuk mengetahui strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan melalui Program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dan bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah Mengimplementasikan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada point pertama (*No Proverty*) dengan baik dengan menjalankan program PKH (Program Keluarga Harapan) dan program lainnya yang bertujuan mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh dan menjalankan strategi yang tertera dalam Renstra (Rencana Strategis) dengan cukup baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan terimplementasi dengan baik dengan mencangkup indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan dan dengan perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang sudah memenuhi standar yang baik dan berkualitas.

Kata Kunci : *Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs)*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Implementasi Program Sustainable Development Goals oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan.”** Shalawat dan juga salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa ada banyak kesalahan dan kekurangan. Namun bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikannya.

Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Prof Dr. phil. Saiful Akmal, M.A Selaku dosen Pembimbing I saya yang telah mengarahkan dan membimbing selama studi saya.
6. Mirza Fanzikri, S.Sos.I.M.Si Selaku dosen Pembimbing II saya yang

telah mengarahkan dan membimbing selama studi saya.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry yang telah menyumbangkan ilmunya selama peneliti mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Sunarno dan Ibunda Sri Yuningsih selaku support sistem utama yang sudah selalu mendoakan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terimakasih kepada Nenek tercinta Sri Kanti yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada adik-adik tercinta Haniyah Hadziqah dan Nur Auliana yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat baik penulis, Hijaiyah Imanda Putri, Syarifa Ilhami, Hafizh Aqram, Zaky Yuddin, Rahmadi, Sulasmi, Melda Amelina Febriani, Rizky Ramadhan, Zahratul jannah, Jamratul Ula, yang sudah memberikan semangat, doa, kehangatan, dan keberanian dalam menemani suka duka penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
12. Terimakasih kepada teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Aceh, Forum Anak Tanah Rencong (FATAR), Kejar Mimpi Aceh, Yayasan Suara Aksi Orang Muda (YouthID), Duta Gender UIN Ar-Raniry, yang sudah menjadi teman berproses dan bertumbuh bersama di masa kuliah dan memberikan dorongan semangat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu banyak dalam proses penulisan. Masih banyak kekurangan yang terdapat didalam penulisan ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 13 Desember 2023

Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Penjelasan Istilah.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 <i>Sustainable Development Goals</i>	17
2.2.1 Sejarah <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Dunia....	17
2.2.2 Sejarah <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Indonesia	22
2.2.3 Sejarah <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Aceh.....	26
2.3 Konsep Kemiskinan	28
2.3.1 Definisi Kemiskinan.....	28
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kemiskinan	30
2.4 Teori Kebijakan Publik	31
2.4.1 Kebijakan Publik	31
2.4.2 Implementasi Kebijakan.....	34

2.4.3	Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)	36
2.5	Teori Strategi.....	38
2.5.1	Teori Manajemen Strategi (<i>Strategic Management</i>).....	38
2.6	Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Pendekatan Penelitian	43
3.2	Fokus Penelitian	44
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.4	Jenis dan Sumber Data	46
3.5	Informan Penelitian	46
3.6	Teknik Pengumpulan Data	48
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50
3.8	Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	53
4.2	Gambaran Umum Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banda Aceh.....	56
4.3	Hasil penelitian.....	57
4.3.1	Implementasi Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan	57
4.3.2	Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan Sesuai Dengan SDGs	69
BAB V PENUTUP.....		76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		78
DAFTAR LAMPIRAN		80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		94

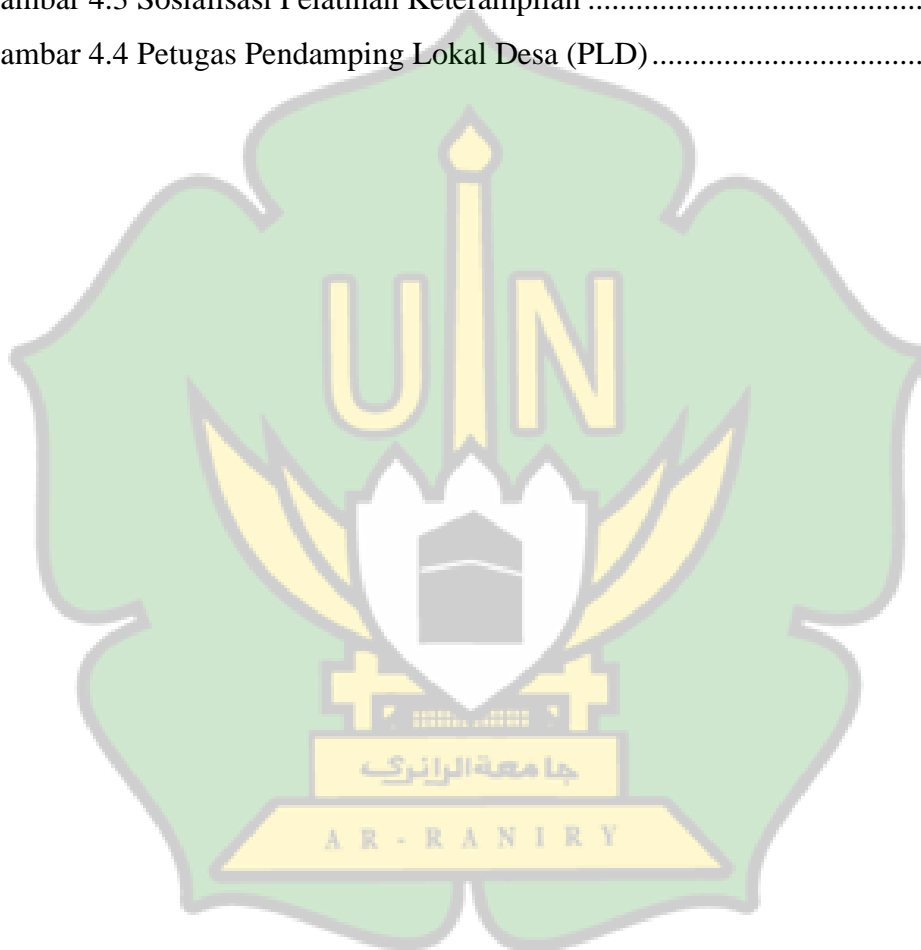
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh.....	6
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Luas Daratan Kota Banda Aceh.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Peta Geografis Kota Banda Aceh.....	55
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Aceh	57
Gambar 4.3 Sosialisasi Pelatihan Keterampilan	61
Gambar 4.4 Petugas Pendamping Lokal Desa (PLD).....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian	80
Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing	85
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	86
Lampiran 4. Rekomendasi Surat Penelitian	87
Lampiran 5. Foto Dokumentasi Wawancara.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena kemiskinan saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat di tuntaskan secara maksimal. Kemiskinan menjadi beban bagi negara berkembang termasuk Indonesia terutama dalam upaya untuk meningkatkan status sebagai negara maju. Adanya kemiskinan ekstrem di beberapa negara menjadi penyebab dasar dari program yang di prakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat sebuah pertemuan pada September 2000 yang di ikuti oleh 189 Negara dengan menyetujui deklarasi yang di kenal dengan sebutan *The Milenium Development Goals* (MDGS).¹ Target dari MDGS sendiri salah satunya adalah dapat mengurangi angka kemiskinan sebesar 50% untuk tahun 2015. Deklarasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi hal yang harus di tanggulangi bersama.²

Setelah *The Milenium Development Goals* (MDGs) berakhir, dengan mampu mengurangi angka kemiskinan di tahun 2015 maka lahirlah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan lanjutan konsep dari MDGs tepat di tanggal 25-27 September di tahun 2015 yang bertempat di sebuah markas PBB yang berada di New York, Amerika Serikat dengan berhadir 193 perwakilan berbagai

¹ Saddam Rasanjani (2018). '*Ending Proverty: Factor that Might Influence the Achivement of Sustainable Development Goals(SDGS) in Indonesia*', Jurnal of Public Administration and Governance, Vol. 8, No.3, ISSN 2161-7104.

² Ishartono dan Santoso T ri Raharjo (2016). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, Social work Journal, Vol. 6, No.2, ISSN 2339-0042.

Negara. Perwakilan negara yang termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut mengumumkan dengan judul “*Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development*” atau jika di artikan adalah “Mengalihpulkan Dunia Kita : Agenda Tahun 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan “. Dokumen SDGS pun *Launching* (terbit) sebagai kelanjutan dari pencapaian MDGS agar dapat terus berlanjut.³

Pemerintah dan Kepala Negara yang sudah sepakat dengan SDGs berkomitmen bersama-sama untuk mengakhiri kemiskinan, meniadakan kelaparan, meningkatkan pendidikan yang berkualitas, dan meminimalisir ketimpangan-ketimpangan yang ada. Prinsip-prinsip pada SDGs berlaku *universal* , terintegrasi dan inklusif atau menyeluruh untuk meyakinkan bahwa “*No One Left Behind*” atau tidak ada satu orangpun yang tertinggal.⁴ Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka ada 17 *Goals* (tujuan) yang sudah di sepakati. Untuk mencapai 17 tujuan tersebut maka sudah ditetapkan 169 target dan 241 indikator yang terukur dengan target dan waktu yang telah di tentukan yaitu 15 tahun hingga tahun 2030 sebagaimana yang sudah tertera di dalam Dokumen SDGs 2030.⁵ Target dan juga tujuan SDGs sendiri dimaksudkan untuk mencapai sebuah pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal penghapusan kemiskinan dan juga kelaparan, mengurangi kesenjangan yang ada di antar negara.

³ Ibid

⁴ Arry Bainus dan Junita Rudi Rachman (2018). *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jurnal of International Studies, Vol. 3, No.1, ISSN 2503-443

⁵ Masta Dahlia Na Pitulu Dkk (2020). *Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)*

Rintangan di bawah pengimplementasian SDGs yang merupakan perpanjangan MDGs masih terbilang banyak. Dari catatan yang ada, presentase penduduk miskin yang ada di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang.⁶ Dengan *track record* (rekam jejak) yang baik dalam pengimplementasian MDGs, dan dengan kebijakan yang relatif baik serta pendanaan yang berfokus pada SDGs di berbagai bidang, maka negara Indonesia memobilisasi kerjasama dengan berbagai mitra dan akan memberikan hasil positif di wilayah Indonesia di 2030 mendatang.⁷

Permasalahan sosial terkhusus kemiskinan merupakan sebuah tantangan dan beban yang berat bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan juga masih menjadi *problem* yang kompleks yang harus segera di tanggulasi bersama. Tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia karena adanya kesenjangan sosial yang merupakan salah satu penyebab utama dari kemiskinan. Selain itu juga di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, distribusi pendapatan yang timpang, produktivitas pekerja yang rendah, upah yang kurang memadai, peluang kerja yang rendah, hingga perpolitikan yang masih tidak stabil juga menjadi faktor dari kemiskinan.⁸

⁶ Nuri Rosidah ' Badan Pusat Statistik Banda Aceh ' , 2023

⁷ Ahmad Dodi Kurtubi . *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (2018) https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/3740_sustainable-development-goals-sdgs-dan-pembangunan-kesejahteraan-sosial-oleh-dodi , (Diakses Pada 2 Mei 2023)

⁸ Nanda Bhayu Pratama dkk . *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan semiskinan di daerah istimewa jogjakarta*, Jurnal Ilmiah Ilmu sosial dan Humaniora, Vol. 6, (2020)

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Indonesia adalah dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, saat ini Indonesia masih di hadapkan dengan masalah kemiskinan. Pada umumnya kemiskinan dan pendapatan yang rendah menjadi permasalahan mendasar bagi negara-negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti halnya Indonesia. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan mencapai kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat melalui pertumbuhan dan perbaikan ekonomi yang dapat mengatasi masalah-masalah pembangunan dan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya kurang dari standar rata-rata. Atau bisa juga di katakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer/dasarnya, seperti makanan, kesehatan dan taraf hidup yang layak.⁹

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan .¹⁰ Selain itu juga indonesia mewujudkan komitmennya dengan menyepakati agenda SDGs maka Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 pada tahun 2017 mengenai

⁹ Mufrihah zain, Indri Handayani dan Rais Dera Pua Rawi . *Manajemen Evaluation Of Poor Standarts Implamentation In Sorong City*, Economic,Business, Accounting and Sociaty Riview, Vol. 2,Nomor 2, P 87-96 (2023)

¹⁰ Debby Intan Suci Rahmawati dkk . *Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Karawang*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, P-ISSN:2622-8327, e-ISSN:2089-5364 (2022)

pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable*.¹¹ Target dari SDGs sendiri adalah di tahun 2030 nantinya akan dapat mengurangi minimal setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam garis kemiskinan di semua dimensi, sebagaimana definisi Nasional.¹² SDGs bukan hanya sebagai komitmen inklusif dan global namun juga sebagai sebuah panduan bagi Negara maju sebagaimana di dalam Perpres Nomor 15 tahun 2017 pada pasal 4 bahwasanya disebutkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, yaitu dokumen yang membuat satu program kerja 5 tahun sekali untuk mendukung pencapaian SDGs sesuai dengan sasaran Nasional.¹³

Beberapa daerah mempunyai tingkat kemiskinan yang bervariasi dari segi presentase maupun jumlah. Jumlah penduduk, keadaan geografis, hingga suatu kebijakan daerah masing-masing menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi berpenduduk miskin di Indonesia terutama di Sumatra . Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa Provinsi Aceh termasuk kedalam kategori 10

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

¹² Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Aceh tahun 2021

¹³ Ahmad R rahim (2019) *Pengarusatamaan SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau*

besar provinsi termiskin di Indonesia. Aceh menempati pada peringkat ke-6 provinsi termiskin, berada di bawah provinsi Gorontalo dan Bengkulu. BPS Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 11,7 ribu orang pada September 2022. Penambahan penduduk miskin itu membuat Aceh masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Berdasarkan data dirilis BPS Aceh, persentase penduduk miskin di Serambi Mekah pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 818,47 ribu orang (14,75 persen), mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2022 yang jumlahnya 806,82 ribu orang (14,64 persen).¹⁴

Tabel 1.1
Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh

Uraian Penduduk Miskin	Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh		
	2020	2021	2022
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	18,97	20,95	19,90
Penduduk Miskin (%)	6,90	7,61	7,13
Penduduk Miskin (Rp)	674 977,00	698 617,00	737 016,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan masih adanya kemiskinan yang terjadi di kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menanggulangi kemiskinan yang masih terus terjadi. Berbagai tindakan sudah di lakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang bertugas untuk menekan angka

¹⁴ bps.go.id (Di akses pada 5 Juni 2023)

kemiskinan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial memiliki peran untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonomi serta tugas dalam bidang sosial.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban membentuk Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 yaitu mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan dan peraturan menteri Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) telah menyusun dokumen dengan berjudul “Rencana Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan di Aceh tahun 2019-2022” . Dimana Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki keterlibatan dalam program TKP2K.¹⁵

Dan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals pemerintah kota Banda Aceh terus melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program yang sudah di canangkan. Berdasarkan mandat perpres No 59 tahun 2017 mengenai Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan sebuah komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menyeluruh (inklusif) dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam kerangka SDGs maka pemerintah Aceh menindaklanjuti dengan di tetapkan

¹⁵ LP2KD Kota Banda Aceh Tahun 2022

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs Aceh tahun 2018.¹⁶

Aceh tidak hanya berkomitmen untuk melaksanakan, tetapi juga bersungguh-sungguh untuk menjadi pelopor terdepan dan teladan di kancah nasional dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals*, sebagai bagian dari upaya menuju perubahan peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini merupakan manifestasi dari kebijakan aktif dan berdampak global yang diimplementasikan oleh Aceh. Hal ini menjadi relevan karena pencapaian SDGs tidak hanya memiliki signifikansi besar bagi masyarakat Negara Indonesia, yang tercermin dalam sinergi antara RPJMA dan SDGs, tetapi juga mencerminkan kontribusi daerah tersebut terhadap komunitas global. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelesaian dokumen RAD TPB/SDGs, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Surat Keputusan (SK) untuk Tim Koordinasi Daerah.¹⁷

Pelaksanaan TPB/SDGs di Aceh dilakukan dengan Gubernur Aceh yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi. Dalam visi, misi, dan 15 program unggulannya, Gubernur Aceh telah mengerahkan untuk mengoptimalkan peran koordinasi Bappeda Aceh dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, parlemen, media dan ormas, filantropi & bisnis, pakar & akademisi, dengan tujuan bersinergi sesuai peran, fungsi, dan kemampuan masing-masing pihak, serta memanfaatkan kelembagaan

¹⁶ <https://bappeda.acehprov.go.id> (Di Akses Pada 20 Desember 2023)

¹⁷ Indikator Sustainable Development Goals Provinsi Aceh 2021

yang ada agar dapat beroperasi secara efektif, baik secara strategis maupun operasional. Bappeda Aceh bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi untuk mencapai TPB/SDGs selama periode 2017-2022.¹⁸

Terkait dengan *goals* (tujuan) SDGs dengan di sandingkan dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Banda Aceh pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah di tentukan dan terus menjalankan program untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 nantinya. Salah satu langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mewujudkan SDGs point pertama adalah menjalankan program PKH (Program Keluarga Harapan) yang merupakan salah satu program prioritas Nasional. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. PKH lebih di tujukan kepada upaya membangun sistem perlindungan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya, PKH dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Indonesia Nomor; 42/HUK/2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin. PKH merupakan program perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana keluarga miskin tersebut harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

¹⁸ Ibid

Penelitian ini berfokus pada tujuan pertama dari SDGs yaitu tanpa kemiskinan. Dimana, pada penelitian ini peneliti ingin melihat peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan SDGs terutama pada implementasi kebijakan dan strateginya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Implementasi Program Sustainable Development Goals Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* yang dapat mengurangi kemiskinan?
2. Apa strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan melalui program SDGs?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di kemukakan di atas, maka tujuan yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* yang dapat mengurangi kemiskinan

2. Untuk mengetahui strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan melalui program SDGs

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai penulis, skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *implementasi program sustainable development goals* oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan.
- b. Sebagai sebuah sarana pengembangan ilmu pengetahuan atau teori yang sudah penulis pelajari di bangku perkuliahan
- c. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang pengimplementasian Program *Sustainable Development Goals* Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara luas, yaitu:

- a. Memberikan gambaran secara luas tentang Program *Sustainable Development Goals* pada tujuan pertama yaitu tanpa kemiskinan yang ada di kota Banda Aceh.

- b. Sebagai bahan kajian mengenai peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan
- c. Dapat menambah pengetahuan tentang peran Dinas Sosial dalam pengimplementasian SDGs.

1.5 Penjelasan Istilah

1. MDGs merupakan kepanjangan dari (*Milenium Development Goals*) yang merupakan deklarasi hasil kesepakatan kepala negara perwakilan dari 189 Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di jalankan pada September 2000.
2. Implementasi Program merupakan rangkaian aktivitas lanjutan terdiri dari proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis atau operasional yang diambil untuk mewujudkan suatu program.
3. SDGs merupakan kepanjangan dari *Sustainable Development Goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan lanjutan dari MDGs. Dengan memiliki 17 Goals, 4 pilar dan 64 target.
4. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan.
5. Mengurangi kemiskinan adalah tindakan baik dari segi ekonomi maupun sumber daya manusianya untuk mengangkat keluar dari kemiskinan secara permanen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi atau sumber sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi data sekaligus informasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

1. Ishartono dan Santoso Tri Raharjo dalam jurnal “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*”. Dalam penelitiannya membahas tentang isu kemiskinan yang di anggap penting dan penanganan kemiskinan yang harus di pahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program maupun kegiatan. Sebagaimana di nyatakan dalam SDGs pada tujuan pertama yaitu *No Proverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama dan merupakan sebuah prioritas. Hal ini di sepakati oleh PBB untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, dan tentunya tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan *Goal* pertama atau tanpa kemiskinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah konsep analisis wacana, didalamnya menggambarkan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan bagaimana SDGs dapat menjadi sebuah solusi dan pemacu naiknya perekonomian yang terus berkelanjutan hingga masa 2030 mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masing-masing mengalami fluktuatif sehingga imbas dari kemiskinan ini membawa dampak ke berbagai permasalahan seperti kemiskinan dapat menyebabkan kurang gizi, rentan terhadap penyakit, serta tidak mampu untuk membiayai pendidikan.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kemiskinan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menitikberatkan pada implementasi SDGs sendiri dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh.

2. Nanda Bayu Pratama, Eko Priyo Purnomo dan Agustiara pada tahun 2020 tentang “*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Yogyakarta yang sejalan dengan SDGs guna menghapuskan kemiskinan. Program tersebut akan menjadi indikator guna tercapainya tujuan dalam menghapuskan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang

¹⁹ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, Social work Journal, Vol. 6, No.2, ISSN 2339-0042

bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa target dari Target penurunan tingkat kemiskinan yang ditetapkan pada periode pelaksanaan MDGs, yaitu untuk menekan kemiskinan hingga 10,30%, tidak berhasil direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pada masa penerapan SDGs, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadikan penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu fokus utama. Harapannya adalah bahwa dalam jangka waktu berlakunya SDGs hingga tahun 2022, target penurunan tingkat kemiskinan yang diproyeksikan dapat tercapai pada kisaran 7-8%..²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang program Sustainable Development Goals (SDGs) dan upaya pemerintah dalam pengimplementasiannya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penelitian yang ingin dilakukan yaitu lebih terfokus pada upaya pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

3. Masta Dahlia Napitulu Dkk “Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)”. Dalam penelitiannya mengkaji tentang Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Tujuan

²⁰ Nanda Bhayu Pratama dkk (2020). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di daerah istimewa jogjakarta*, Jurnal Ilmiah Ilmu sosial dan Humaniora, Vol. 6

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan BUMdes untuk mewujudkan tujuan dari program SDGs di Desa Bakal Gajah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang sudah dikumpulkan, baik data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi selama penelitian.

Hasil riset menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) telah berhasil mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tingkat keberhasilan yang baik. Pencapaian tersebut melibatkan pencapaian desa yang memiliki akses layak terhadap air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi yang positif, lapangan pekerjaan yang memadai, serta kemitraan dalam pembangunan desa melalui langkah-langkah seperti komunikasi efektif, manajemen sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, yang didukung oleh unit-unit usaha seperti depot air minum, unit gas elpiji, peternakan ayam boiler, dan unit layanan perbankan BRILink.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus penelitian dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu membahas bagaimana implementasi yang di jalankan oleh Dinas Sosial kota banda Aceh dalam mengurangi angka kemiskinan .

2.2 Sustainable Development Goals

2.2.1 Sejarah Sustainable Development Goals (SDGs) di Dunia

SDGs adalah kelanjutan dari MDGs dengan perbedaan mendasar antara keduanya. MDGs cenderung birokratis dan eksklusif karena tidak melibatkan unsur nonpemerintah. Di sisi lain, SDGs memiliki tujuan yang lebih luas dan komprehensif, mengakomodasi partisipasi unsur nonpemerintah, dan memiliki cakupan yang universal. SDGs dirumuskan melalui proses partisipatif yang sangat inklusif, dengan melibatkan konsultasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat filantropi, baik dari negara maju maupun berkembang.²¹

SDGs menekankan pada kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara. Prinsip inklusifitas juga tercermin dalam konsep "No One Left Behind", di mana tidak ada pihak yang tertinggal atau terpinggirkan. Dalam hal tujuan, jika sebelumnya MDGs bertujuan untuk mengurangi setidaknya separuh, SDGs memiliki target untuk menghilangkan sepenuhnya, dengan sasaran "Zero Goals". Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) atau SDGs menekankan pada 5P, yaitu People (manusia), Planet (bumi), Peace (perdamaian), Prosperity (kesejahteraan), dan Partnerships (kemitraan). Pada tahun 2030, tujuan akhir program SDGs adalah mencapai tiga tujuan yang mulia, yaitu mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.²²

²¹ SMERU Research Institute. 2017. *Dari MDGs Ke SDGs: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret*, Buletin SMERU No. 2/2017.

²² Hoelman, Mickael B., 2015. Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, Hamong Santono. *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*, November 2015. infid

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-70 yang diadakan di New York, Amerika Serikat, pada bulan September 2015, menjadi momen bersejarah dalam upaya pembangunan global. Sebanyak 193 Kepala Negara dan pemerintahan dari seluruh dunia hadir untuk mencapai kesepakatan mengenai agenda pembangunan universal baru yang tercantum dalam dokumen yang dikenal sebagai "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development". Dokumen ini berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang akan diberlakukan mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Agenda ini lebih dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals atau SDGs.²³

SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang disetujui oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dalam substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disetujui lebih dari 15 tahun yang lalu hanya terdiri dari 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasaran tersebut hanya bertujuan untuk mengurangi setengah dari setiap masalah pembangunan yang diungkapkan dalam tujuan dan sasaran tersebut.

MDGs menempatkan tanggung jawab yang besar pada negara-negara berkembang dan kurang berkembang dalam mencapai target pembangunan, sementara memberikan peran yang tidak seimbang kepada negara-negara maju. Dalam prosesnya, MDGs juga memiliki kekurangan karena penyusunannya hingga implementasinya bersifat eksklusif dan sangat birokratis, tanpa melibatkan aktor

²³ Ibid hal 25-26

non-pemerintah seperti Organisasi Masyarakat Sipil, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Di sisi lain, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik dari segi kualitatif dengan memasukkan isu-isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs, maupun kuantitatif dengan menargetkan pencapaian yang menyeluruh terhadap setiap tujuan dan sasaran. SDGs juga bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada semua negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang, untuk berkontribusi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian, setiap negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mencapai SDGs.²⁴

Konsep SDGs muncul dalam Konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah mencapai kesepakatan tentang tujuan bersama yang universal, yang dapat menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam upaya menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, SDGs didasarkan pada lima pondasi utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. SDGs bertujuan untuk mencapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030, yaitu mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Meskipun fokus utama adalah mengakhiri kemiskinan, kedua capaian lainnya juga

²⁴ Bariyah, Nuru. (2021). *Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 11 No. 1

menjadi penting. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, dirumuskanlah 17 Tujuan Global. 17 Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut adalah :

1. Menghilangkan Kemiskinan (No Poverty). Mewujudkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia.
2. Memberantas Kelaparan (Zero Hunger). Mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan.
3. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik (Good Health and Well-Being). Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua individu di segala usia.
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education). Meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan berkualitas, serta mendorong pembelajaran sepanjang hayat untuk semua orang.
5. Kesetaraan Gender (Gender Equality). Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
6. Akses Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation). Menjamin akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy). Mendorong akses terhadap energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern.
8. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak (Decent Work and Economic Growth). Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lapangan kerja yang layak, dan produktif bagi semua orang.

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur yang Berkelanjutan (Industry, Innovation and Infrastructure). Membangun infrastruktur berkualitas, mendorong pertumbuhan industri inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi.
10. Mengurangi Ketimpangan (Reduced Inequalities). Mengurangi ketimpangan di dalam dan antara negara-negara.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities). Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production). Mendorong konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Aksi Terhadap Perubahan Iklim (Climate Action). Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan di Bawah Air (Life Below Water). Mempertahankan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat (Life on Land). Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, memerangi kerusakan lahan dan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (Peace, Justice and Strong Institutions). Meningkatkan perdamaian yang inklusif dan masyarakat yang

berkeadilan, serta membangun institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk Tujuan (Partnerships for the Goals). Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.²⁵

2.2.2 Sejarah *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia

Deklarasi Milenium Development Goals (MDGs) muncul sebagai hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara yang menetapkan delapan tujuan untuk mencapai pada tahun 2015. Sejak disepakatkan pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi paradigma pembangunan yang diakui hampir oleh semua negara di dunia. Meskipun tujuan dan target MDGs tidak bersifat mengikat secara hukum, banyak negara tetap memantau kemajuannya melalui serangkaian indikator pencapaian di dalam negeri masing-masing.

Ini menunjukkan keseriusan komunitas global dalam melaksanakan MDGs. Banyak pihak yang mengevaluasi pelaksanaan MDGs selama empat belas tahun terakhir di seluruh dunia. Meskipun masih ada capaian yang belum terpenuhi, namun penting untuk diakui bahwa MDGs telah memberikan dampak besar pada dunia. Sebagai saksi sejarah, MDGs telah menjadi inisiatif pengurangan kemiskinan terbesar dalam catatan manusia. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu \$1,25 per hari, telah berkurang sebanyak setengah miliar. Angka kematian anak turun lebih dari 30 persen, dengan sekitar

²⁵ Ibid hal 39

tiga juta nyawa anak terselamatkan setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun 2000. Angka kematian akibat malaria juga mengalami penurunan sebesar 25 persen. Di Indonesia, implementasi MDGs telah menghasilkan perubahan positif. Meskipun beberapa target MDGs masih memerlukan upaya keras untuk tercapai, banyak dari mereka telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, bahkan beberapa sudah tercapai.²⁶

Indonesia berhasil mengurangi proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Pemerintah juga berhasil mengurangi ketidaksetaraan gender di tingkat pendidikan tinggi, seperti tercermin dari penurunan yang mencolok pada rasio APM perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/ Paket C, dari 93,67 persen pada tahun 1993 menjadi 101,40 persen pada tahun 2011. Di samping itu, pencapaian target MDGs untuk angka kejadian tuberkulosis di Indonesia dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus dari 343 pada tahun 1990 menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2011.²⁷

Pada tanggal 25 September 2015, sejarah mencatat komitmen dari 193 negara di dunia, termasuk Indonesia terhadap Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. Komitmen ini tertuang dalam Resolusi PBB nomor 70/1 yang menghasilkan *Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda: "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development"* Indonesia secara signifikan berperan dalam proses pembentukan

²⁶ Ibid halaman 55

²⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2012)

SDGs. Indonesia berperan signifikan dalam semua proses ini. High Level Panel of Eminent Persons merupakan Panel Ahli yang dibentuk Sekjen PBB untuk memberikan masukan tentang Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. Co-chairs dari Panel Ahli ini adalah: Presiden RI ke6 Susilo Bambang Yudhoyono, PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Sirleaf Johnson.²⁸

Dalam forum global selanjutnya, Indonesia secara aktif terlibat, sebagaimana terlihat dalam partisipasinya dalam Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG-SDGs). Dalam forum ini, Indonesia membahas 27 kelompok isu yang diamanatkan oleh Laporan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB (Rio+20) tahun 2012. Output dari dialog ini menjadi sumbangan dalam penyusunan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015, seperti diuraikan sebelumnya. Secara simultan, Indonesia juga berperan sebagai anggota dari Inter-governmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing (IG-SDF), yang memiliki peran sentral dalam aspek pendanaan implementasi Agenda Pembangunan Pasca 2015.²⁹

Selama periode 2012-2014, Indonesia berperan aktif dalam *the Global Partnership for Effective Development Cooperation* (GPEDC), yang memiliki tujuan untuk menyusun mekanisme dan pola kerjasama pembangunan internasional yang lebih efektif (*the HOW*) dalam upaya pencapaian target Agenda Pembangunan Pasca 2015 (*the WHAT*)³⁰

²⁸ Kajian Indikator Sustainable Development Goals (2014)

²⁹ Ibid

³⁰ Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) 2014

Berakhirnya periode MDGs pada tahun 2015 meninggalkan sejumlah tugas yang perlu diselesaikan selama periode Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlangsung hingga tahun 2030. Periode pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) dari tahun 2000 hingga 2015 telah membawa kemajuan signifikan. Sebanyak 70 persen dari total indikator yang mengukur tujuan MDGs berhasil tercapai oleh Indonesia. Meskipun demikian, beberapa indikator yang menilai pencapaian di sektor kesehatan masih jauh dari target dan memerlukan perhatian khusus.³¹

Indonesia, sebagai negara yang telah menyetujui penerapan Sustainable Development Goals (SDGs), berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan SDGs melalui serangkaian kegiatan dan pengambilan langkah-langkah strategis. Hingga akhir tahun 2016, beberapa langkah yang telah diambil oleh Indonesia melibatkan (i) pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan, termasuk indikator proksi, (iii) penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) penyusunan peraturan presiden yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) persiapan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.³²

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SDGs, pemerintah telah menetapkan Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs memiliki tugas untuk mengoordinasikan berbagai

³¹ ibid

³² Ibid

kegiatan yang terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil, dan pihak filantropi serta bisnis, telah dilibatkan dalam proses ini. dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, beberapa prinsip yang telah disepakati dan diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah universalitas, yang mendorong implementasi SDGs di semua negara, termasuk negara maju dan berkembang. Di tingkat nasional, implementasi SDGs akan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integrasi, yang mengandung arti bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait dalam semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi, khususnya terkait dengan program, kegiatan, dan alokasi anggarannya. Prinsip terakhir adalah "No One Left Behind," yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberikan manfaat bagi semua, terutama yang rentan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahap atau proses pelaksanaan SDGs di Indonesia..³³

2.2.3 Sejarah Sustainable Development Goals (SDGs) di Aceh

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara serasi dengan rencana pembangunan daerah (RPJMA) 2017-2022. Ini sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang menandakan komitmen untuk

³³ Ibid

mengarahkan Aceh ke arah kesejahteraan dan perdamaian melalui pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada pelayanan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang diluncurkan pada 12 April 2018 dengan landasan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 dirumuskan dengan memperhatikan elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini selanjutnya diuraikan dalam berbagai bidang pembangunan yang memiliki relevansi dengan agenda pembangunan di tingkat lokal. Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada akhir September 2015, para pemimpin dari 193 negara anggota PBB mengadopsi kesepakatan sejarah yang terkait dengan tujuan dan target universal yang bersifat transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal sebagai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dan sejalan. Sebagai suatu rencana tindakan global yang akan diimplementasikan selama 15 tahun mendatang, pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip dasar yang dikenal sebagai prinsip 5 P, yaitu People (Manusia), Planet (Planet), Prosperity (Kemakmuran), Peace (Perdamaian), dan Partnership (Kemitraan). People (Manusia) berfokus pada usaha untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam berbagai bentuk dan dimensi, serta memastikan bahwa semua individu dapat mengaktualisasikan potensi dan kapasitas mereka dengan layak dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet (Planet) berarti melindungi planet ini dari degradasi, termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengambilan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim sehingga planet ini terjaga.

2.3 Konsep Kemiskinan

2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merujuk pada tingkatan kehidupan yang rendah atau situasi ketidakmampuan secara ekonomi untuk mencapai tingkat hidup yang biasa di masyarakat setempat. Ketidakmampuan ini dicirikan oleh pendapatan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat pendapatan yang rendah ini juga berakibat pada kemampuan yang terbatas untuk mencapai tingkat hidup rata-rata, termasuk dalam hal kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Secara mendasar, kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang timbul dalam kehidupan sosial, terutama di masyarakat yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini memerlukan tindakan terencana, terintegrasi, dan komprehensif yang dilakukan dalam waktu yang terbatas. Tindakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan yang sedang berlangsung dengan mengatasi permasalahan kemiskinan.³⁴

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan merujuk pada kondisi sosial ekonomi individu atau kelompok yang mengalami ketidak terpenuhan hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat.³⁵ Hak-hak dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) pada tahun 2004 juga menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan juga berlaku bagi mereka yang bekerja namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.³⁶

³⁴ Andi Muhammad Arif Haris. *Studi Pemerintahan Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

³⁵ Undang-Undang No.24 Tahun 2004

³⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Chambers menguraikan dimensi kemiskinan yang memberikan penjelasan mengenai sifat permasalahan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan, yang tidak hanya terbatas pada kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, perlakuan hukum yang tidak memadai, kerentanan terhadap tindak kejahatan, risiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri. Kemiskinan, yang dipandang sebagai permasalahan multidimensional, dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu:

- 1) Kemiskinan Absolut Ini adalah kondisi di mana pendapatan seseorang atau kelompok berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diukur sebagai pengeluaran atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok terkait dengan pemenuhan standar kesejahteraan.
- 2) Kemiskinan Relatif merupakan bentuk kemiskinan yang timbul karena dampak kebijakan pembangunan yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat, menciptakan ketidaksetaraan pendapatan atau ketidaksetaraan

standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum mencapai program-program pembangunan sering kali disebut sebagai daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural merupakan bentuk kemiskinan yang timbul akibat sikap dan kebiasaan individu atau masyarakat, yang sering berasal dari budaya atau adat istiadat yang tidak mendukung perbaikan taraf hidup dengan cara modern. Kebiasaan ini bisa berupa sikap malas, pemborosan, kurang kreatif, dan kecenderungan bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2.4 Teori Kebijakan Publik

2.4.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan perencanaan program, aktivitas, aksi, sikap, keputusan, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.³⁷

kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-

³⁷ Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.³⁹ Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan.⁴⁰ Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani.⁴¹

³⁸ Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³⁹ Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>

⁴⁰ Wahyudi, A. (2016). *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>

⁴¹ Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). *The Public and its Policies*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan .⁴² Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.⁴³

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab menyatakan bahwa:

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi

⁴² Freeman, R. (2006). *Learning in Public Policy*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press.

⁴³ Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.⁴⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang.

2.4.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang diterapkannya.

⁴⁴ Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

A. Teori mengenai Implementasi Kebijakan

1. Teori George C. Edward III

Berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat, demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. ketika implementor memiliki sikap atau perspektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan Fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi yang Fleksibel

2.4.3 Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau yang disingkat dengan PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.⁴⁵

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk

⁴⁵ <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> (di akses pada 20 Desember 2023)

memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.⁴⁶

2.5 Teori Strategi

2.5.1 Teori Manajemen Strategi (*Strategic Management*)

Menurut Fred R David, Manajemen Strategi merupakan seni dan ilmu dari perumusan, pengaplikasian, serta evaluasi dari berbagai keputusan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan Manajemen Strategi yaitu memanfaatkan dan membuat oportunitas/ kesempatan baru dan berbeda untuk masa depan.⁴⁷

Dalam proses strategi tidak hanya dilakukan perencanaan dan implementasi saja terhadap strategi tersebut, ada tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu strategi. Dalam Teori strategic management oleh Fred R David, menurutnya ada tiga tahapan dalam strategi, yaitu :

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah tahapan awal dalam melakukan strategi. Pada tahapan ini diperlukan perumusan, membuat konsep menentukan kesempatan dan ancaman, serta melihat sasaran yang tepat. Dalam perumusan strategi terdapat

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ David, F. R. (2011). *Strategic Management Concepts and Cases (Thirteenth)*.

pula langkah-langkah awal untuk merumuskan masalah-masalah yang ada dan dicari segala cara-cara yang sesuai untuk mewujudkan strategi tersebut.

Kegiatan dari perumusan strategi adalah :

1. Mengembangkan visi dan misi.
2. Mengidentifikasi kesempatan dan hambatan eksternal.
3. Menentukan kekuatan dan kelemahan internal.
4. Menetapkan tujuan jangka panjang.
5. Menghasilkan alternatif strategi.
6. Menentukan strategi khusus

Perumusan strategi dapat menghasilkan :

1. Keputusan untuk memasuki bisnis baru.
2. Keputusan melepaskan bisnis tertentu.
3. Pengalokasian sumber daya.
4. Keputusan memperluas kegiatan atau membuat suatu variasi.
5. Keputusan memasuki pasar internasional.
6. Keputusan merger perusahaan atau usaha bersama.
7. Cara untuk menghindari pengambilalihan yang buruk

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan penerapan atas segala yang telah dirumuskan dan direncanakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam kata lain implementasi dapat di disebut sebagai tindakan nyata untuk penerapan yang telah dirumuskan dalam perumusan strategi. Pada penerapan atau implementasi strategi dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit yang terlibat.

Menggerakkan anggota organisasi seperti pegawai dan manajer untuk menempatkan rumusan strategi ke dalam suatu tindakan yang mendukung strategi yang telah dirumuskan merupakan hal yang sering dianggap sebagai tahapan paling sulit dalam manajemen strategi.

Syarat utama keberhasilan implementasi strategi adalah

kemampuan komunikasi interpersonal. Kegiatan dalam implementasi strategi adalah:

1. Mengembangkan budaya yang mendukung strategi yang telah direncanakan tersebut.
 2. Membuat struktur organisasi yang efektif.
 3. Mengarahkan usaha dalam pemasaran.
 4. Mempersiapkan anggaran.
 5. Mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Informasi.
 6. Menjembatani antara kompensasi ke karyawan dan kinerja perusahaan atau organisasi.
3. Evaluasi Strategi

Pada evaluasi strategi merupakan tahap akhir untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari implementasi strategi yang telah direncanakan dalam kata lain evaluasi strategi merupakan tahapan gimana menilai prestasi atau membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, pada tahap ini strategi akan dilihat apakah sesuai atau tidak dengan yang diharapkan.

Fungsi dari evaluasi strategi adalah agar manajer dapat mengetahui informasi tentang keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan kegiatan pokok, selain itu tujuan dari evaluasi strategi adalah :

- a. Mereview faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan.
- b. Mengukur kinerja.
- c. Mengambil tindakan korektif⁴⁸

2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran atau alur berpikir sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini. Berdasarkan kerangka pemikiran yang peneliti kembangkan, permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Program SDGs dengan Subjek penelitian adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pengimplementasian program SDGs dilakukan menggunakan teori George C. Edward III . Selanjutnya peneliti ingin menganalisis Strategi yang dilakukan menggunakan teori strategi oleh Fred R David dengan tiga asumsi yaitu dilakukan dengan perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

⁴⁸ Ibid halaman 97



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data di olah pada tahun 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study research*) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁹

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.⁵⁰

Alasan utama peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menggambarkan secara lebih mendalam mengenai implementasi program Sustainable Development Goals oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan.

⁴⁹ Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

⁵⁰ Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, ypgyakarta 2013.hal.20

Peneliti berharap dapat menjelaskan secara mendalam terhadap Kebijakan dan Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan SDGs untuk mengurangi kemiskinan.⁵¹

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan focus penelitian lebih didasarkan pada tingkat informasi baru yang akan diperoleh dari situasi sosial.⁵² Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah Implementasi Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan.

Fokus penelitian berfungsi untuk menentukan batasan-batasan penelitian mengenai masalah dan ruang lingkup yang akan diteliti berdasarkan kerangka hasil berfikir peneliti agar tepat sasaran dan menjawab masalah yang diteliti.

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mendukung program SDGs yang	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	George Adward III

⁵¹ Sugiyono, 2013, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung. 2016

⁵² Sugiyono, 2013, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung. 2016

	dapat mengurangi kemiskinan		
2	Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan melalui program SDGs	1.Perumusan Strategi 2. Implementasi Strategi 3.Evaluasi Strategi	Fred R David

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kota Banda yang beralamat di Jalan Residen Danubroto No.5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lam Lagang, Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan serta memiliki peran penting dalam merealisasikan program SDGs pada *Goal* pertama yaitu No Poverty (tanpa kemiskinan) untuk masyarakat di kota Banda Aceh. Selain itu, Lokasi ini dipilih karena merupakan kantor dan tempat aktivitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang merupakan tempat untuk melakukan wawancara informan penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung dapat diperoleh dari informan penelitian melalui proses wawancara tanpa perantara.⁵³ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain:

- a) Catatan hasil wawancara.
- b) Data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁵⁴

3.5 Informan Penelitian

Informan pada penelitian merupakan sampel yang ada di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan tujuan penelitian adalah mereka yang terlibat aktif dan secara langsung terlibat dalam program implementasi SDGs pada point pertama yaitu tanpa kemiskinan. Teknik pengambilan informan atau sampel penelitian adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan pertimbangan tertentu, seperti informan tersebut dianggap

⁵³ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu lainnya)*. Jakarta: Kencana. 2010. hlm. 132.

⁵⁴ Mustofa, 2015. "Metode Penelitian dengan NPF dan Roa." *Jurnal*: 1-9

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau informan tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti.⁵⁵

Adapun kriteria yang ditentukan dalam menjadi informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Masyarakat sebagai penerima manfaat.
2. Telah ikut menangani kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh dan penerima manfaat dari program pengentasan kemiskinan.
3. Memahami terkait dengan Program Sustainable Development Goals terutama pada tujuan pertama yaitu tanpa kemiskinan.

Dalam penelitian ini, tolak ukur peneliti dalam menentukan informan penelitian yakni berdasarkan keterlibatan informan secara langsung mengenai implementasi program sustainable development goals oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan. Sehingga, kemampuan informan dalam memberikan informasi terkait objek penelitian tidak diragukan dan absah.

Berikut table daftar informan penelitian:

⁵⁵ Sugiyono 2019

Tabel 3.2
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1 orang
2	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1 orang
3	Ketua penyuluhan Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1 orang
4	Masyarakat Miskin	1 orang
Jumlah		4 orang

Sumber: Data di olah peneliti pada tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dengan tujuan menemukan permasalahan yang harus diteliti namun juga ingin mengetahui secara lebih mendalam dari responden.⁵⁶

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, wawancara ini merupakan metode dengan memakai panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dalam proses wawancara ini adalah

⁵⁶ Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, sKualitatif, dan R & D (27 ed). Alfabeta

untuk mendapatkan permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁵⁷

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara dan menggunakan metode semi terstruktur adalah untuk mengetahui hal-hal yang dicari secara mendalam tentang partisipan dalam menjelaskan Implementasi Program SDGs oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Kemiskinan serta untuk menemukan data secara lebih terbuka.

2. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati sebuah objek dan subjek penelitian yang di lakukan secara langsung. Dengan observasi, peneliti dapat melihat secara langsung dan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.

Dalam hal ini, peneliti melakukan Observasi pada lokasi penelitian terkait di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Selain itu, observasi juga akan dilakukan melalui media yang digunakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pengimplementasian SDGs dalam mengurangi kemiskinan.

⁵⁷ ibid

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang di dapat dengan melihat traskip, gambar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan adalah berupa gambar, qanun, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang valid adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembua penelitian ilmiah, untuk itu perlu dilakukan uji keabsahan data. sebagai berikut:

a. Kredibilitas

Kredibilitas adalah teknik yang dilakukan untuk melihat suatu kepercayaan dari data yang dihasilkan selama melakukan penelitian, hasil wawancara yang didapat dari orang sekeliling juga dapat dijadikan indikator untuk memperkuat penelitian yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini untuk kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal lain diluar data untuk keperluan pengecekan data, atau lebih sering dianggap triangulasi adalah pembanding data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dari

penemuan yang didapat dari berbagai sumber data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi data untuk membandingkan hasil wawancara antara narasumber satu dengan yang lainnya dengan hasil pengumpulan data seperti dokumentasi, arsip dan catatan lain.⁵⁸

3.8 Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data, maka selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan langkah-langkah berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik analisis data melalui proses yang sederhana terkait data yang diperoleh dari lapangan. Melalui reduksi data, data yang diperoleh peneliti harus diminimalisir dengan tidak mengambil data-data yang tidak diperlukan sehingga data-data yang sudah konkrit dapat diambil dan diverifikasi.

2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks yang diurai secara singkat, bagan, hubungan stakeholder, dan lain sebagainya. Dengan melakukan penyajian data berdasarkan data yang telah direduksi maka akan memudahkan peneliti untuk menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya untuk disimpulkan.

3) Kesimpulan

⁵⁸ J. Andriani H Hardani, Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup. 2017.

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan pada uraian-uraian data yang telah disajikan. Yang kemudian kesimpulan akhir dibuat harus relevan dan dapat menjawab rumusan masalah.⁵⁹



⁵⁹ J. Andriani H Hardani, Ustiawaty, Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

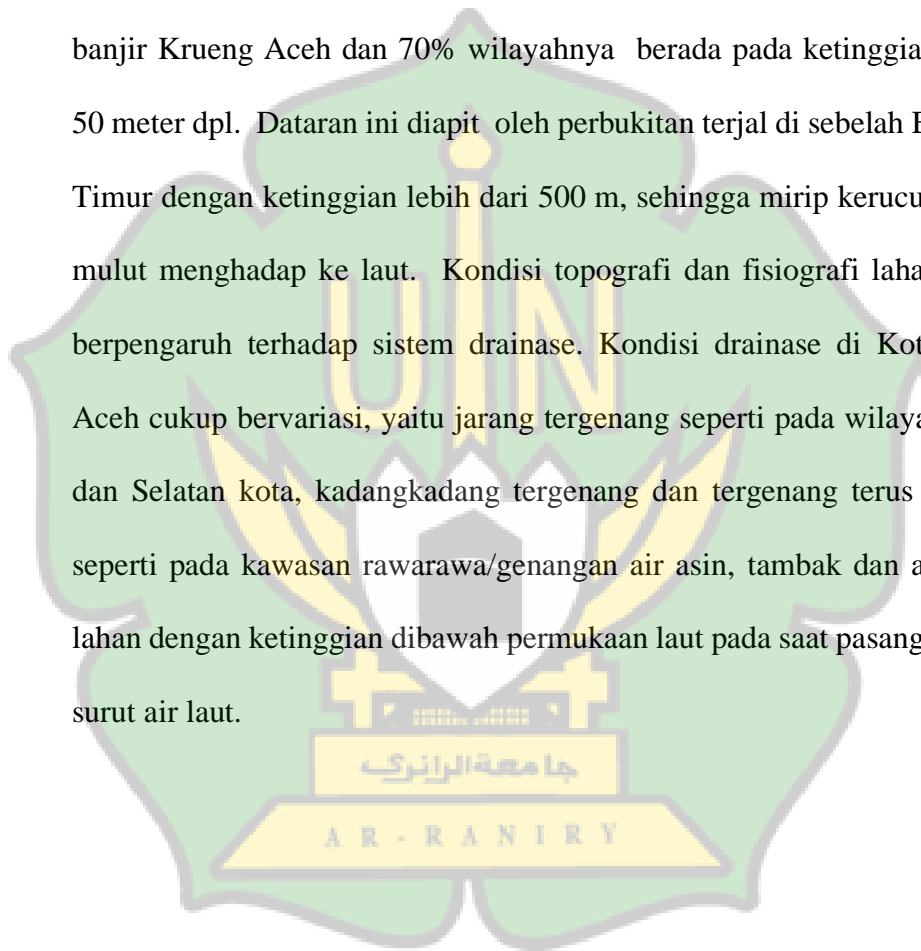
Banda Aceh, yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Aceh, terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Dari segi posisi astronomis, kota ini berada di antara 05016'15-05036'16 Lintang Utara dan 95016'15-95022'35 Bujur Timur, terletak di belahan bumi bagian Utara. Ketinggian rata-rata kota ini mencapai 0,80 meter di atas permukaan laut.

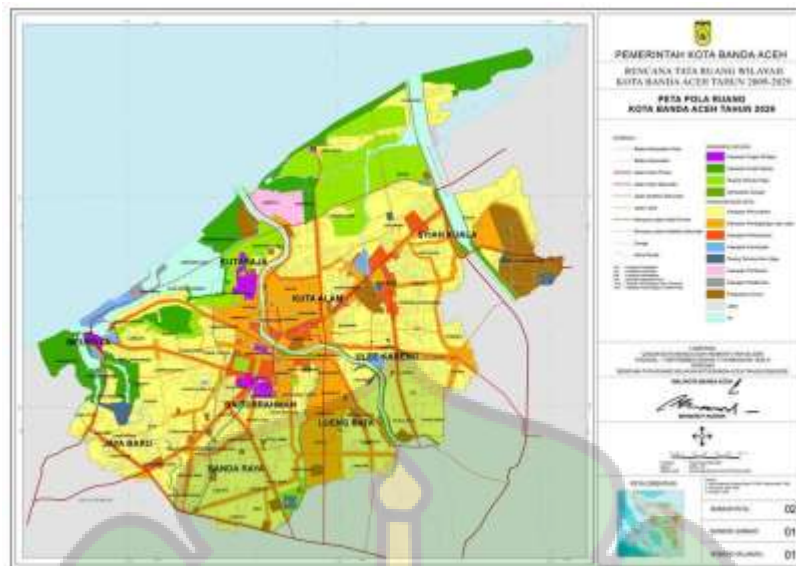
Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut :

- 1). Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- 2). Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
- 3). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
- 4). Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara 0,45 m sampai dengan $\pm 1,00$ m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar

dengan kemiringan (lereng) antara 2–8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan, khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah Utara atau pesisir pantai. Dalam lingkungan makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadangkadang tergenang dan tergenang terus menerus seperti pada kawasan rawarawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian dibawah permukaan laut pada saat pasang maupun surut air laut.





Gambar 4.1 Peta Geografis Kota Banda Aceh

Sumber: Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

Adapun, secara administrative Kota Banda Aceh secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu dengan perbandingan luas per kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Luas Daratan Kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (KM2)
1	Meuraxa	Ulee Lheue	7,26
2	Baiturrahman	Neusu Jaya	4,54
3	Kuta Alam	Bandar Baru	10,05
4	Syiah Kuala	Lamgugob	14,24
5	Ulee Kareng	Ulee Kareng	6,15

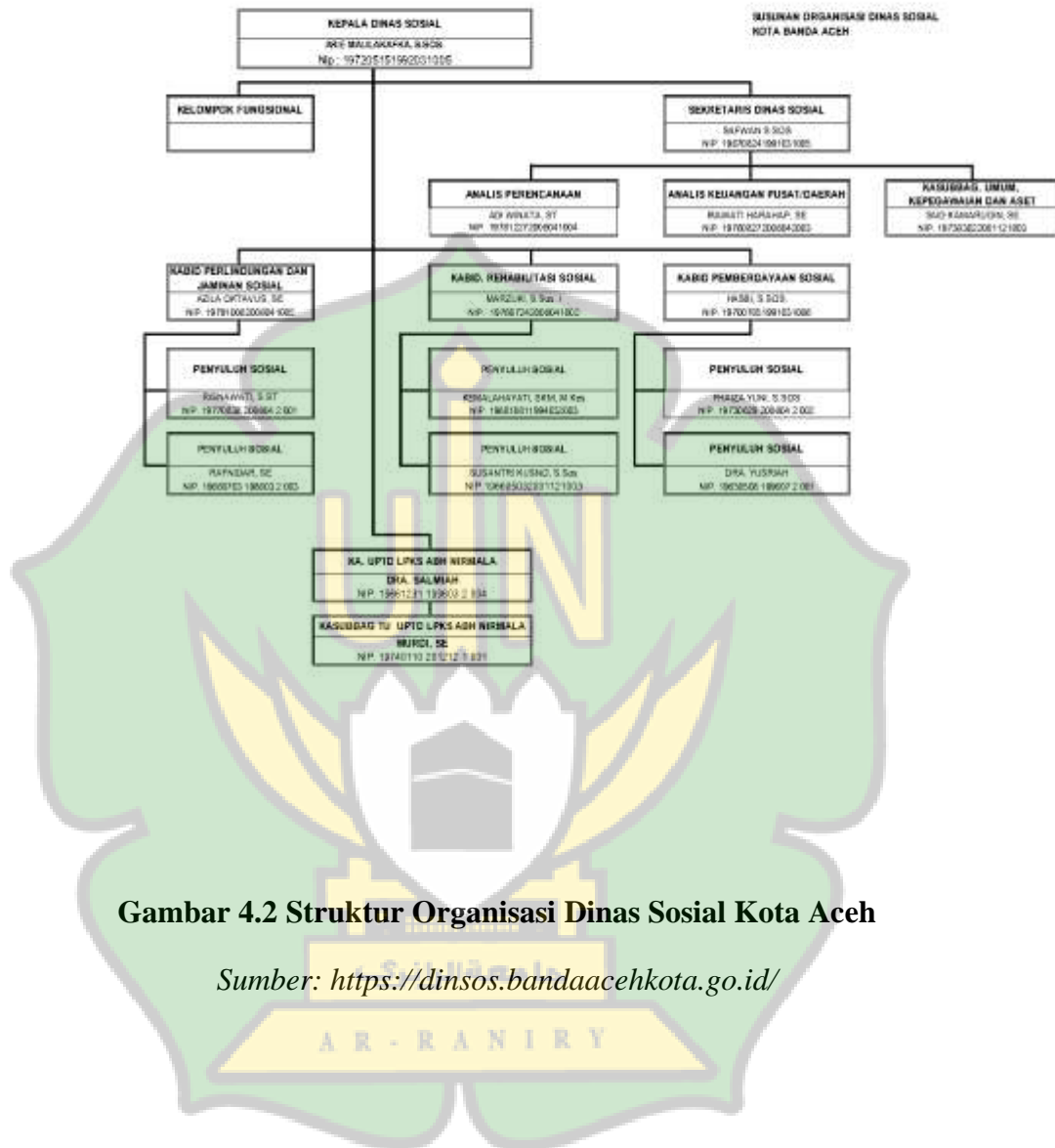
6	Banda Raya	Lamlagang	4,79
7	Kuta Raja	Keudah	5,21
8	Lueng Bata	Lueng Bata	5,34
9	Jaya Baru	Lampoh Dayah	3,78
Banda Aceh			61,36

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2023

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah entitas lembaga yang terbentuk di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016. Dinas ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota di sektor Sosial. Sebelum keberadaan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 yang mengatur tentang Struktur, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, urusan Sosial diurus oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Berikut struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Aceh

Sumber: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/>

4.3 Hasil penelitian

4.3.1 Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan

Program *sustainable development goals* (SDGS) pada *goals* pertama atau tanpa kemiskinan telah di lakukan dan di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 15

Tahun 2010 dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/932/2018. Dasar Hukum pembentukan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.⁶⁰

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan dalam penanganan kemiskinan di kota Banda Aceh oleh Dinas Sosial dan bagaimana strategi Dinas Sosial dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat di ukur dalam indikator berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan awal dalam langkah implementasi kebijakan. komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi. Tujuan dari

⁶⁰ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

komunikasi sendiri merupakan untuk penggerak mengerjakan sesuatu baik itu kegiatan sosialisasi, bakti dan sebagainya. Selanjutnya regulasi/peraturan yang menjadi acuan dari indikator komunikasi adalah Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertera pada pada pasal 19 yaitu Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam rangka mewujudkan pengimplementasian SDGs .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.sos mengemukakan bahwa:

“Komunikasi yang kami lakukan dalam menjalankan kebijakan seperti PKH adalah secara langsung dan sudah ada tim yang menjalankannya. Kalau kepada masyarakat, kebijakan yang kami jalani secara langsung yaitu melalui sosialisasi dan secara tidak langsung melalui media-media masa seperti radio. Hal ini kami rasa dapat membantu masyarakat dalam penyebaran informasi, agar informasi yang di lakukan dapat secara menyeluruh tersampaikan oleh masyarakat yang berada di Kota Banda Aceh”⁶¹

⁶¹Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh,Safwan S.Sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .

Dan adapun hasil wawancara peneliti bersama kabid pemberdayaan masyarakat fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu bapak Hasbi S.Sos mengatakan bahwa :

“ Komunikasi yang kami lakukan kepada masyarakat selain dalam bentuk sosialisasi secara langsung di lapangan, kami juga sosialisasi melalui media masa yaitu seperti radio, seperti halnya kemarin, kami sempat on air di radio flamboyant dan beberapa radio yang ada di Kota Banda Aceh ”⁶²

Sementara itu kepala penyuluhan sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu Yuni S.Sos, mengemukakan hal yang sama dan penambahannya, yakni:

“Komunikasi yang kami lakukan terhadap masyarakat tentunya secara langsung terhadap masyarakat baik di lapangan dan juga sosialisasi melalui radio atau media masa dan kami juga mempunyai websaite yang dapat di lihat dan di akses langsung oleh masyarakat secara lebih praktis dan efesien ”⁶³

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari masyarakat penerima manfaat yang menyatakan bahwa :

Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Hasbi, S.sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁶³ Hasil wawancara dengan kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin. Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Hasbi S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

“Dinas Sosial Kota Banda Aceh benar adanya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan bantuan dan program yang di jalankan sejauh ini yang saya lihat”⁶⁴



Gambar 4.3 Sosialisasi Pelatihan Keterampilan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara berkaitan dengan indikator komunikasi yaitu telah memuaskan, sebagaimana dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh yang terlibat pada penanganan kemiskinan di Kota Banda Aceh melalui komunikasi kepada masyarakat secara langsung, media masa, dan melalui

⁶⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat , pada 24 Juli 2023

website yang di kelola oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. indikator komunikasi dalam upaya penanganan kemiskinan merupakan faktor pendorong terjalannya keterbukaan dalam informasi, berjalan dengan baik karena memiliki visi misi dan tujuan yang sama.

Adanya komunikasi merupakan sebuah dorongan kebijakan yang baik dan jelas berkaitan dengan munculnya persoalan yang ada di lapangan dan melalui komunikasi yang baik dapat memperkuat proses penanganan kemiskinan .Dan adanya komunikasi yang baik akan sangat membantu untuk memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman dan memberikan rasa nyaman untuk melakukan suatu tindakan/kegiatan. Tentunya suatu keberhasilan dalam indikator ini menjadi motivasi bagi para pihak untuk meningkatkan kinerjanya lebih maksimal.

2. Sumber Daya

Ketika suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan gamblang, sumber daya juga tentu harus terlibat dalam sebuah kebijakan. Sumber daya merupakan sebuah faktor yang penting dalam suatu kebijakan dan tentunya sumberdaya menjadi faktor yang mendukung suatu program. sumber daya tersebut dapat merupakan sumber daya manusia atau SDM, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran, dan sumber daya kewenangan. Tujuan Sumber daya adalah untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sumber daya yang di gunakan dalam penanganan kemiskinan biasanya meliputi sumber daya manusia atau SDM, peralatan, kewenangan, dan anggaran dana. Sumber daya dalam penanganan kemiskinan sangat penting dilakukan karena tanpa ada dukungan sumber daya

maka keberhasilan tidak akan dicapai secara maksimal. Dengan sumber daya maka penanganan kemiskinan dapat di tangani dengan sebaik-baiknya., Dalam Konteks Sumberdaya, Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu Safwan S.sos mengatakan bahwa:

“Dalam penanganan kemiskinan, sumber daya yang kami kerahkan tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama, ini merupakan sumberdaya yang nantinya di butuhkan di lapangan dan sangat penting, dan tentunya juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang di gunakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh”⁶⁵

Sementara itu kepala bidang pemberdayaan fakir miskin yaitu Hasbi S.Sos, mengemukakan hal yang sama, yakni:

“Dalam menangani kemiskinan, kami sebagai Dinas Sosial Kota Banda Aceh tentunya berperan penting dalam hal sumber daya. Sumber daya yang kami gunakan tentunya ada dari SDM yang nantinya terlibat sebagai fasilitator-fasilitator pendamping desa karna di setiap kecamatan dan desa ada petugasnya kalau di kecamatan namanya TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di desa namanya tenaga pendamping kalau di Banda Aceh ada 90 desa dan setiap desa ada pendampingnya sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.Sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .

tentunya juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang sudah di fasilitasi”⁶⁶

Kemudian ketua penyuluhan sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh Yuni S.Sos mengemukakan bahwa:

“Sumberdaya sangatlah di butuhkan dalam mengimplementasikan program dan kebijakan Dinas Sosial sebagaimana tenaga-tenaga pendamping, TKSK yang mereka fokusnya untuk mengurangi kemiskinan. Disini kami juga tidak asal-asalan dalam memilih fasilitator-fasilitator yang kami kerahkan . mereka telah di uji dan di anggap berkompeten dalam menjalankan tugasnya tentunya ketika mereka berkompeten, mereka punya power dan ide untuk mendukung program yang di jalankan. Seperti tenaga TKSK, mereka di seleksi di Provinsi lalu kemudian di BKU-kan di masing-masing kecamatan . jadi mereka tersebar di setiap kecamatan yang ada di kota Banda Aceh dan kalau di kampung PLD (pendamping lokal desa) jadi setiap kampung ada pendampingnya di tingkat desa juga kita seleksi dan kita meminta dari keciknya karna harapannya mereka lebih mengetahui kondisi kampung tersebut mana masyarakat miskin dan mana masyarakat yang kaya. Jadi kalau ada update data mereka tau.”⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara Hasil wawancara dengan kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin. Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Hasbi S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Penyuluhan Sosial, Yuni S.Sos,pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Hal ini di perkuat dengan pernyataan masyarakat penerima manfaat yang menyatakan bahwa :

“Kami rasa Dinas Sosial Sudah melakukan semana mestinya karna disini ada PLD (pendamping lokal desa) dan di kecamatan juga ada jadi mereka sudah benar melaksanakannya saya rasa .”⁶⁸



Gambar 4.4 Petugas Pendamping Lokal Desa (PLD)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara berkaitan dengan indikator sumberdaya yaitu telah memuaskan, sebagaimana Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah mengerahkan sumberdaya yang kompeten dalam setiap programnya. Hal ini sangat mempengaruhi berjalannya program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat, pada tanggal 24 juli 2023, di lambugop , Banda Aceh

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap atau kecenderungan seseorang terhadap suatu masalah atau tugas tertentu. Ini juga bisa merujuk pada pengaturan atau penataan suatu hal, terutama dalam konteks pengelolaan atau penanganan sesuatu. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, disposisi dapat merujuk pada kebijakan atau keputusan tertentu yang diambil untuk menangani atau menyelesaikan suatu masalah atau dapat merujuk pada langkah-langkah atau keputusan yang diambil dalam rapat tertentu. Pemahaman tentang disposisi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya.

Dalam Konteks Disposisi Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.Sos mengemukakan hal berikut yakni:

“Sejauh ini dalam penanganan kemiskinan semua terlibat dan kami mengutamakan komitmen utama kami yaitu menurunkan angka kemiskinan dan sejauh ini tidak ada masalah atau kendala karena kami mengutamakan sifat demokratis. “⁶⁹

kemudian disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin menyampaikan bahwa:

“Dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sesuai dengan permensos dan terkait dengan kemiskinan kami semua satu komitmen yaitu mengupayakan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.Sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .

bagaimana caranya kemiskinan itu bisa turun jadi tidak ada permasalahan tentunya. karena kami mengutamakan musyawarah. “⁷⁰

Kemudian ketua penyuluhan sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Yuni S.Sos mengatakan :

“Dinas Sosial sejauh ini semua terlibat dalam hal penanganan kemiskinan, kami dengan tim fasilitator kecamatan dan desa selalu mengutamakan yang namanya musyawarah jadi tidak ada permasalahan sejauh ini dan kami sepakat semuanya untuk berkomitmen bersama dalam penurunan angka kemiskinan yang ada di kota Banda Aceh. “⁷¹

Hal ini di perkuat dengan pernyataan masyarakat:

“yang kami lihat Dinas sosial kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya ini terlihat ketika mereka menjalankan tugasnya dengan baik . ” ⁷²

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara bahwasanya pada indikator disposisi telah berjalan dengan baik dalam penanganan kemiskinan di Kota Banda Aceh karena pihak-pihak terkait mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan tidak ada permasalahan dalam

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin, Hasbi., S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ketua Penyuluhan Sosial, Yuni S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁷² Hasil wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat, pada tanggal 24 juli 2023, di lambugop , Banda Aceh

penanganan kemiskinan dan Dinas Sosial terus berkomitmen sehingga bisa di buktikan dengan angka kemiskinan sudah mulai turun.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, dan salah satu elemennya adalah SOP (*Standar oprational procedure*). Tujuan dari struktur birokrasi ini adalah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan harapan menghindari birokrasi yang rumit yang sering disebut sebagai red-tape. Sekertaris Dinas Sosial Safwan S.Sos mengemukakan bahwa:

“Struktur birokrasinya bisa di lihat dari sk yang tercantum dalam website karena semuanya ada sk itu dalam melaksanakan kegiatan. ”⁷³

Ketua bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin, mengemukakan bahwa:

“Kami selalu berpedoman sesuai peraturan permensos tentunya ini sudah sesuai dengan Standart Oprating Prosedur jadi strukturnya jelas dan bisa dilihat dalam sk ”⁷⁴

kemudian disampaikan oleh Yuni S.Sos selaku ketua penyuluhan sosial :

⁷³ Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.Sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin, Hasbi., S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

“strukturnya bisa kita lihat dari sk dan tentunya kita suda sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah yang ada ”⁷⁵

Hal ini di perkuat dengan pernyataan masyarakat penerima manfaat :

“Menurut saya, mereka jelas kerja nya jadi pasti sudah terstruktur dengan pedoman yang ada ”⁷⁶

Hasil wawancara dalam penelitian ini, struktur birokrasi dalam penanganan kemiskinan berjalan dengan cukup optimal di karenakan strukturnya telah jelas dan terarah untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam penanganan kemiskinan terlihat detail dan rinci serta mudah dipahami apa saja yang harusnya dilakukan dan tugas apa saja yang dapat dilaksanakan melalui struktur yang sudah ada.

4.3.2 Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan Sesuai Dengan SDGs

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah proses identifikasi, pengembangan, dan perencanaan langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu organisasi atau entitas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjangnya. Ini melibatkan evaluasi situasi internal dan eksternal organisasi, pengidentifikasian kekuatan dan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Penyuluhan Sosial, Yuni S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat, pada tanggal 24 juli 2023, di lambugop , Banda Aceh

kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, organisasi dapat merumuskan rencana strategis yang efektif untuk mencapai visi dan misinya.

Proses perumusan strategi melibatkan analisis mendalam, pemilihan strategi yang tepat, dan pengembangan rencana tindakan yang akan diimplementasikan. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang pasar, pesaing, dan tren industri, serta kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berevolusi.

Perumusan strategi menjadi kunci dalam membimbing keputusan dan tindakan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan jangka panjangnya.

Berdasarkan konteks perumusan strategi hasil wawancara dari Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan :

“Perumusan strategi yang kami lakukan yaitu dengan melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan efisien. Beberapa langkah yang dilibatkan dalam perumusan strategi tersebut yaitu, menganalisis kebutuhan masyarakat, evaluasi sumberdaya, dan penetapan prioritas. Untuk strategi dapat di lihat melalui renstra Dinas Sosial Kota Banda Aceh”⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.Sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .

kemudian Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin menyampaikan bahwa:

“Dalam perumusan strategi kami menyusun program-program dan layanan yang sesuai dengan tujuan awal yaitu kami ingin menurunkan angka kemiskinan kalau bisa di tiadakan”⁷⁸

Ketua Penyuluhan Sosial, Yuni S.Sos menyampaikan bahwa :

“Dalam perumusan strategi, kami juga berkolaborasi dengan pihak eksternal agar penanggulangan kemiskinan ini dapat berjalan inklusif di Kota Banda Aceh”⁷⁹

Hasil dari penelitian setelah melakukan wawancara pada perumusan strategi berjalan dengan baik dan memiliki konsep yang terstruktur sehingga dengan begitu dalam pelaksanaan strategi dapat berjalan secara optimal.

2.Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah fase pelaksanaan rencana strategis yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi maupun instansi. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengubah visi dan tujuan strategis menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari. Dalam konteks ini, implementasi strategi adalah cara organisasi/ instansi

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin, Hasbi., S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Penyuluhan Sosial, Yuni S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

menerapkan kebijakan, program, dan inisiatif yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategisnya. Proses ini mencakup tindakan seperti alokasi sumber daya, pengaturan struktur organisasi, pelatihan karyawan, dan pengawasan terhadap perkembangan serta pencapaian tujuan strategis.

Pada implementasi strategi, Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh Safwan S.Sos mengatakan bahwa :

“Dalam implementasi strategi tentunya kami melakukan langkah-langkah yang tepat sebagaimana yang sudah di rumuskan sebelumnya. Dan kami berusaha keras untuk menjalankan strategi ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kami rasa program yang di laksanakan sudah merujuk pada SDGs”⁸⁰

Sedangkan kepala bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin mengatakan bahwa :

Tentunya kebijakan itu sudah termasuk dalam strategi, jadi kami selaku pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus berupaya dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang nantinya dapat mengurangi angka kemiskinan”⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.Sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin, Hasbi., S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dalam hal ini ketua penyuluhan sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan bahwa :

“Dinas Sosial Kota Banda Aceh melaksanakan strategi dengan mengorganisir program dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat, menyediakan sumber daya dengan efisien, berkomunikasi secara efektif, mengembangkan keterampilan dan kapasitas staf, serta terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan strategi tersebut.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan langkah-langkah konkret seperti program dan layanan, alokasi sumber daya yang efisien, komunikasi yang efektif, serta pemantauan. Dinas Sosial telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasarannya

3.Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah proses penilaian terhadap efektivitas dan relevansi rencana strategis suatu lembaga/organisasi. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan penentuan sejauh mana strategi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Kesimpulan dari evaluasi strategi membantu organisasi/instansi dalam penyesuaian, perbaikan, atau pengembangan strategi yang lebih baik.

⁸² Hasil wawancara dengan Ketua Penyuluhan Sosial, Yuni S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Berdasarkan konteks evaluasi strategi hasil wawancara dari Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan :

“Jika di tinjau dari segi evaluasi strategi, tentunya program yang di jalankan ada yang sudah baik dan ada yang belum. Dengan adanya evaluasilah kami mengetahui yang mana yang harus di perbaiki dan yang mana muungkin program itu harus kita hentikan jadi tahap evaluasi selalu kami jalankan karena penting untuk program kedepannya”⁸³

Sedangkan kepala bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin mengatakan bahwa :

“Evaluasi menjadi bagian penting buat kami, karena disitulah kami tau strategi yang kami rasa kurang maksimal dan kami bertukar pikiran untuk memunculkan strategi yang lebih solutif kedepannya”⁸⁴

Dalam hal ini ketua penyuluhan sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan bahwa :

“sebagai ketua penyuluhan saya sangat terbantu dengan adanya evaluasi, tentu ya kami melakukan evaluasi di setiap proram yang kami jalankan dan

⁸³ Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Safwan S.Sos, pada 24 Juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin, Hasbi., S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

pasti ada program yang belum maksimal. Dengan evaluasi kami bisa memunculkan strategi yang lebih baik tentunya “⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan evaluasi strategi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program yang di jalankan. Evaluasi tersebut mencakup pengukuran pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat.



⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Penyuluhan Sosial, Yuni S.Sos, pada tanggal 24 juli 2023 di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

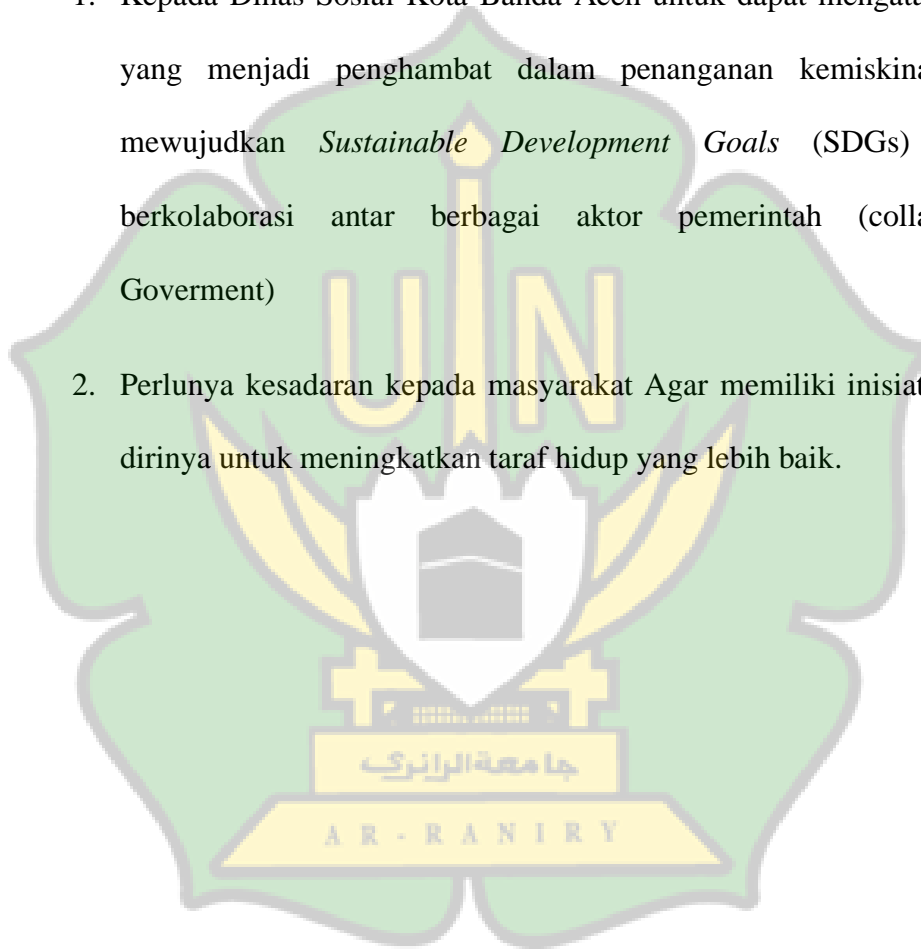
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mendukung program *Sustainable Development Goals (SDGs)* dilakukan dengan mencakup indikator pertama dalam penelitian ini, yaitu komunikasi, kemudian yang kedua sumberdaya dan yang ketiga disposisi dan yang keempat adalah struktur birokrasi, dalam hal ini telah dilaksanakan. hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka kemiskinan yang didorong dengan kerja sama dan komitmen yang penuh dalam upaya penanganan kemiskinan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh berhasil mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan *program Sustainable Development Goals (SDGs)* .
2. Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan melalui program SDGs dilakukan dengan perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi . perumusan strategi berhasil dilakukan dengan baik dan juga terimplementasi dengan baik dan menunjukkan hasil yang baik, dan terus berbenah setelah di evaluasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran terhadap Implementasi Program *Sustainable Development Goals* oleh Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk dapat mengatasi faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan kemiskinan demi mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan berkolaborasi antar berbagai aktor pemerintah (collaborative Government)
2. Perlunya kesadaran kepada masyarakat Agar memiliki inisiatif dalam dirinya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Saddam Rasanjani . *'Ending Proverty: Factor that Might Influencethe Achivment of Sustainable Development Goals(SDGS) in Indonesia'*, Jurnal of Public Administration and Governance, Vol. 8, No.3, ISSN 2161-7104. (2018)

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, Social work Journal, Vol. 6, No.2, ISSN 2339-0042. (2016).

Arry Bainus dan junita Rudi Rachman . *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jurnal of International Studies, Vol. 3, No.1, ISSN 2503-443 (2018)

Masta Dahlia Na pitulu dkk .*Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)*. 2020

Arry Bainus dan junita Rudi Rachman (2018). *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jurnal of International Studies, Vol. 3, No.1, ISSN 2503-443

Nanda Bhayu Pratama dkk . *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan semiskinan di daerah istimewa jogjakarta*, Jurnal Ilmiah Ilmu sosial dan Humaniora, Vol. 6, (2020)

SMERU Research Institute.2017.*Dari MDGs Ke SDGs: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret*, Buletin SMERU No. 2/2017.

Hoelman, Mickael B., 2015. Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, Hamong Santono. *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*, November 2015. Infid

Bariyah, Nuru. (2021). *Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 11 No. 1

Andi Muhammad Arif Haris. *Studi Pemerintahan Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Website

Admin. (2023, Maret 31). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari Publikasi: <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/702/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2022.html>

Ahmad Dodi Kurtubi . *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (2018)
<https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/3740-sustainable-development-goals-sdgs-dan-pembangunan-kesejahteraan-sosial-oleh-dodi> , (Diakses Pada 2 Mei 2023)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* yang dapat mengurangi kemiskinan?

2. Apa strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan melalui program SDGs?

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mendukung program SDGs yang dapat mengurangi kemiskinan	1) <i>komunikasi</i> 2) <i>sumberdaya</i> 3) <i>disposisi</i> 4) <i>struktur birokrasi</i>	George Adward III

2	Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan	1) <i>Perumusan strategi</i> 2) <i>Implementasi strategi</i> 3) <i>Evaluasi strategi</i>	Fred R David
---	---	--	--------------

1. Sekertaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kabid

**Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin, Ketua
Penyuluhan Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Rumusan Masalah 1 :

Dimensi Implementasi Kebijakan

A. Komunikasi

1. Bagaimana proses komunikasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan program SDGs dalam mengurangi kemiskinan terhadap berbagai *stakeholders*?

2. Apakah Implementasi tersebut dapat di terima secara jelas dan akurat oleh masyarakat ?

B. Sumber Daya

1. apakah ada kewenangan untuk menjamin program SDGs berjalan dengan yang diharapkan dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh?

2. Apakah ada fasilitas yang dipakai untuk melakukan program seperti dana dan sarana prasarana?

C.Disposisi

1. Apakah dalam melaksanakan program SDGs pada point pertama Dinas Sosial dapat menjalankan program dengan sikap dan respon yang baik?
2. apakah pelaksanaan program tersebut berjalan dengan efektif?

D. Struktur Birokrasi

1. Apakah dalam melaksanakan program SDGs Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan standard operating procedure (SOP) ?
- 2.Siapa saja yang terlibat dan berperan penting dalam mengimplementasikan program SDGs dalam mengurangi kemiskinan yang ada di kota Banda Aceh sesuai dengan struktur birokrasi ?

Rumusan Masalah 2 :

Teori Manajemen Strategi

A.Perumusan Strategi

1. Bagaimana perumusan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi kemiskinan sesuai dengan program SDGs?
2. Apa yang dihasilkan dari perumusan strategi tersebut ?

B. Implementasi Strategi

1. Bagaimana implementasi strategi pengurangan kemiskinan yang sudah di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sesuai dengan SDGs?

2. apakah tindakan yang dilakukan sudah mendukung strategi yang di rumuskan sebelumnya ?

C. Evaluasi

1. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh ?

2. Apakah ukuran kinerja yang dilakukan sudah cukup baik ?

2. Masyarakat

Rumusan Masalah 1 :

11. Apakah kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah benar di laksanakan ?

12. Apa saja program yang sudah di jalankan yang anda rasakan ?

13. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai menurut masyarakat ?

Rumusan Masalah 2 :

11. Apa saja program yang bersifat sustainable yang anda rasakan?

12. apakah program sudah efektif di mata masyarakat?

13. apa saja kekurangan program dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh ?



Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FSEIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 576/Un.08/FSEIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian sarjana/graduation pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka diperlukan perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tertera namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2011, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2012 tentang UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2012 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2012 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 490 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Wewenang Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KEK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor PER/07/2007 tentang Pelaksanaan Pendidikan Penerimaan Negara Tidak Biasa (PNBT) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (SK-BLU);
- 12. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.42995/2023, Tanggal 30 November 2022.

Memperhatikan

Keputusan Menteri Program Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 01 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KERATU

- 1. Menunjuk dan menugaskan saudara:
- 1. Di gbl, Saiful Akmal, S.A., sebagai pembimbing I
- 2. Nizam Fauzani, S.Sos.I, M.Si, sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi

Nama : Saiful Akmal
NIM : 190802025
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jabatan : Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG) oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan

KEDUA

Segala ketentuan yang dikalaukan oleh surat keputusan ini diberlakukan pada DEPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

AR-RANIRY


Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,
WISU MULIA

Terdapat

- 1. Dekan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk ditandatangan dan dibenarkan;
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian

20/07/23, 20.32 Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uni@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1229/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/06/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Dinas Sosial Provinsi Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI ANGGUN OKTAVIANA / 190802039**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Program Sustainable Development Goals Oleh Dinas Sosial Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juni 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 04 Desember 2023 Eka Januar, M. Soc.Sc.



<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>
1/1

Lampiran 4. Rekomendasi Surat Penelitian

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Tpk. Hasyim Banda Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.kotaaceh.go.id>, Email : kesbangpolpemkotabandaaceh@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070 / 506

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Nomor: B-1229/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Data Awal

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Sri Anggun Oktaviana

Alamat : Jl. Tgk. Indra Gampong Barabung Kec. Darussalam Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Implementasi Program Sustainable Development Goals Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Program Sustainable Development Goals Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan.

Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : R - R A N I R Y

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Eka Januar , M.Soc.Sc (Wakil Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Sponsor : -

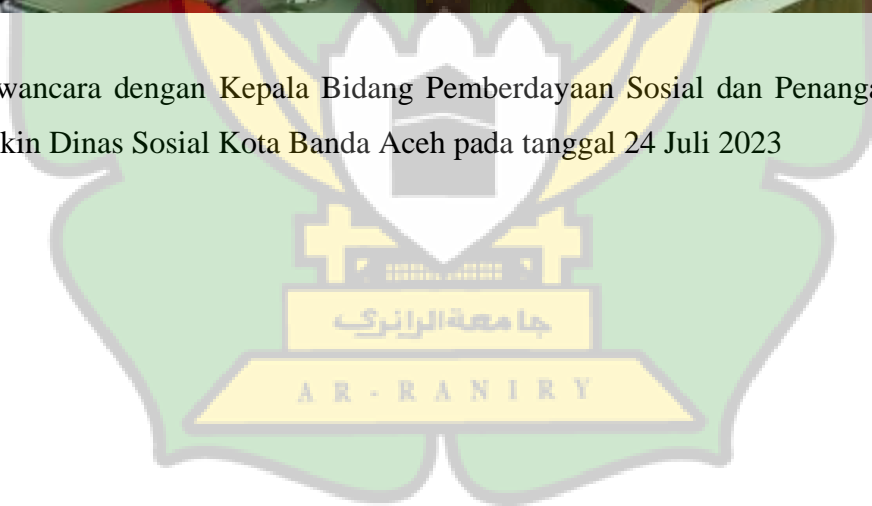
Lampiran 5. Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023



Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023





Wawancara dengan Ketua penyuluhan Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023

AR-RANIRY



Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Desember 2023





Wawancara dengan Ketua penyuluhan sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023



Wawancara dengan Masyarakat Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023

